



**PUTUSAN**

Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**GIRI PALLARYAN BIN HERWAN**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/11 September 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. PANJALU Rt.010/002, Desa Warnasari, Sukabumi, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, Erni Supenawati, SH. sebagai **Pemohon**;

melawan

**YENI SELIANI BINTI SOLIHIN**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/25 Mei 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Panjalu Rt. 010/002 Kel./Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register perkara Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2003 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: B 271/Kua.10.2.28/DN.01/10/2020 dan berdasarkan Nomor Akta Nikah: 363/32/XII/2003 ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di kediaman bersama di Kp. Panjalu Rt. 010/002 Kel/Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat ;

Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;

NEYSHYA GIRNIA PALLARYAN, Sukabumi 20 Februari 2004

FELICIA GAVRILA PALLARYAN, Sukabumi 07 Februari 2012

CAITHLYN GANIYA PALLARYAN, Sukabumi 09 Agustus 2018

Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sekitar bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat di rukunkan dan di damaikan kembali ;

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi kurang lebih pada bulan November 2018 dan sulit untuk di rukunkan lagi ;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi alasan ketidak harmonisan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah:

Bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami ;

Bahwa Termohon sering melalaikan tugas nya sebagai seorang istri kepada Pemohon ;

Bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya;

Bahwa Pemohon sekitar bulan November 2018 memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Perumahan BPC Sumantri Cisaat Kab. Sukabumi, karena Pemohon tidak tahan dengan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada titik temu ;

Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha dan pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa menghadapi keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi Pemohon sudah berusaha bersabar, akan tetapi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak mungkin;

Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan biaya perkara berdasarkan aturan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd



**PRIMER:**

Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;

Memberikan izin kepada Pemohon (**GIRI PALLARYAN BIN HERWAN**)  
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**YENI SELIANI BINTI SOLIHIN**)

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon  
keputusan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon  
dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon  
dan #0047# mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian  
masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah  
diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian  
Mediator bersertifikat (#0060#) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi  
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi Termohon tidak pernah  
datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di  
persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan  
Termohon untuk hadir di persidangan pada persidangan tanggal 23 Desember  
2020 dan telah dipanggil Termohon melalui jurusita pengganti dengan resmi  
dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd  
tanggal ... yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut  
tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan  
dilaksanakan diluar hadir pihak Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B 271/Kua.10.2.28/DN.01/10/2020 bertanggal 14 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibadak untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 Desember 2003, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara Cerai Talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs. Mustofa Kamil, M.H untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus diluar hadir, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus diluar hadir, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... dan ...;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak ..., yang disebabkan ... sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak ... sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon [copy dari posita gugatan/permohonan];
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2017 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri [copy dari posita gugatan/permohonan];
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga #0046# dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus diluar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbddari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sejumlah Rp416000,00 ( empat ratus enam belas ribu );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, A. Mahfudin, S.Ag., M.H. dan Drs. Usman Ali, S.H Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripuddin, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**A. Mahfudin, S.Ag., M.H.**

**Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si.**

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Drs. Usman Ali, S.H

Panitera,

Pupu Saripuddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);